



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis>.

Received: 4 Agustus 2024, Revised: 24 Agustus 2024, Publish: 1 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Implementasi Program Sukabumi *Creative Hub* Sebagai Inovasi Daerah dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Kota Sukabumi

M. Rijal Amirulloh<sup>1\*</sup>, Mochammad Abdul Aziz Muslim<sup>2</sup>, Alifiya Salva Nurrohmah<sup>3</sup>, Regina Amelia<sup>4</sup>, Bunga Putri Azzahra<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, [mrijalamirulloh@ummi.ac.id](mailto:mrijalamirulloh@ummi.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, [azizmuslim22@ummi.ac.id](mailto:azizmuslim22@ummi.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, [alifiya.s18@gmail.com](mailto:alifiya.s18@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, [reginaamelia739@gmail.com](mailto:reginaamelia739@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, [bungazahra778@gmail.com](mailto:bungazahra778@gmail.com)

\*Corresponding Author: [mrijalamirulloh@ummi.ac.id](mailto:mrijalamirulloh@ummi.ac.id)

**Abstract:** *This study analyzes the implementation of the Sukabumi Creative Hub (SCH) program as a regional innovation to promote the creative economy in Sukabumi City. Using a qualitative approach, data was collected through interviews, documentation, and observation. The results show that SCH has been quite successful in achieving its objectives, accommodating stakeholder interests, and aligning with measurable targets in creative city indicators and the West Java Creative City Index. The program fosters a collaborative ecosystem, builds creative capacity, and demonstrates the potential of regional innovation to drive positive transformation. However, resource limitations, especially budget constraints, remain a challenge. The study suggests the importance of sustained government support, stakeholder synergy, and further research to optimize SCH's impact on sustainable development in Sukabumi City.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Regional Innovation, Creative Economy, Sustainable Development, Sukabumi Creative Hub*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis implementasi program Sukabumi Creative Hub (SCH) sebagai inovasi daerah dalam mendorong ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SCH cukup berhasil mencapai tujuannya, mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan, dan selaras dengan target terukur dalam indikator kota kreatif dan Indeks Kota Kreatif Jawa Barat. Program ini menumbuhkan ekosistem kolaboratif, membangun kapasitas kreatif, dan menunjukkan potensi inovasi daerah dalam mendorong transformasi positif. Namun, keterbatasan sumber daya, terutama kendala anggaran, masih menjadi tantangan. Studi ini menyarankan pentingnya dukungan pemerintah

yang berkelanjutan, sinergi pemangku kepentingan, dan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan dampak SCH terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Inovasi Daerah, Ekonomi Kreatif, Pembangunan Berkelanjutan, Sukabumi Creative Hub

## PENDAHULUAN

Inovasi daerah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dengan memanfaatkan keanekaragaman budaya dan potensi sumber daya lokal, pemerintah daerah terus berupaya merancang kebijakan inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Simanungkalit et al., 2020). Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2019 meluncurkan program Sukabumi Creative Hub (SCH) sebagai salah satu inovasi untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya. Program ini juga bertujuan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah situasi pandemi (Yurisa & Munandar, 2023).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi memegang peran strategis dalam memfasilitasi perumusan, penyusunan, dan implementasi kebijakan inovatif seperti SCH (Simanungkalit et al., 2020). Namun dalam pelaksanaannya, SCH juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga keterampilan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program SCH sebagai sebuah inovasi daerah dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Model ini menekankan pentingnya memperhatikan isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasinya (context of implementation) dalam menentukan keberhasilan suatu program (Grindle, 1980). Aspek-aspek yang ditelaah meliputi kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, serta ketersediaan sumber daya. Dengan menggabungkan perspektif teoretis dan analisis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika implementasi inovasi daerah dalam mendorong ekonomi kreatif di tingkat lokal. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan inovatif yang efektif dan berkelanjutan.

## TINJAUAN LITERATUR

Inovasi Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Inovasi daerah telah menjadi isu penting dalam pembangunan wilayah di banyak negara, termasuk Indonesia. Muluk (2008) mendefinisikan inovasi di sektor publik sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan dengan karakteristik kebaruan dan kemanfaatan untuk menjawab permasalahan publik yang kompleks. Inovasi dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, inovasi daerah memainkan peranan kunci. Menurut Departemen Perdagangan RI (2008), ekonomi kreatif adalah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Ekonomi kreatif bertumpu pada keragaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Dengan demikian,

inovasi daerah menjadi penting untuk menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif setempat.

Berbagai bentuk inovasi daerah dapat diterapkan untuk mendorong ekonomi kreatif, mulai dari pengembangan infrastruktur pendukung, pemberdayaan pelaku usaha kreatif, fasilitasi akses permodalan, hingga promosi dan perluasan pasar. Inovasi daerah yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri kreatif, serta pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan Grindle Merilee S. Grindle (1980) mengembangkan suatu model analisis implementasi kebijakan yang menekankan dua variabel utama: isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Model ini berpandangan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh sejauh mana isi kebijakan tersebut dapat mengakomodasi konteks atau lingkungan di mana kebijakan dilaksanakan.

Variabel isi kebijakan mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kepentingan kelompok sasaran, yaitu sejauh mana kebijakan mempertimbangkan dan mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi target.
2. Jenis manfaat, merujuk pada dampak positif yang diterima oleh kelompok sasaran dan masyarakat luas dari implementasi kebijakan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan, menggambarkan seberapa besar transformasi yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut.
4. Letak pengambilan keputusan, terkait dengan apakah kewenangan dan tanggung jawab dalam implementasi berada di level pusat atau daerah.
5. Pelaksana program, menyangkut ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan program.
6. Sumber daya, mencakup anggaran, fasilitas, informasi, dan berbagai input lainnya yang menunjang keberhasilan implementasi.

Sementara itu, variabel konteks implementasi meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan berbagai stakeholder dalam implementasi.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa, mencakup struktur organisasi, norma, dan pola hubungan antar lembaga pelaksana.
3. Kepatuhan dan daya tanggap, menyangkut sejauh mana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Model Grindle menawarkan suatu kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas proses implementasi kebijakan. Dengan mempertimbangkan interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasinya, model ini membantu menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat berhasil atau gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi program Sukabumi Creative Hub (SCH) sebagai inovasi daerah dalam mendorong ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang mencakup perwakilan dari Bappeda Kota Sukabumi, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi, serta tim pengelola SCH. Panduan wawancara disusun berdasarkan variabel-variabel dalam model implementasi kebijakan Grindle.

Kedua, dokumentasi kebijakan dan laporan terkait SCH dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan data sekunder yang relevan. Ketiga, observasi lapangan dilakukan di lokasi SCH guna melihat secara langsung pelaksanaan program dan interaksi antar aktor yang terlibat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman

(1994). Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan konsistensi temuan.

Penelitian ini memegang teguh prinsip-prinsip etika dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan tertulis sebelum melakukan pengumpulan data. Seluruh informasi yang diterima digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sukabumi Creative Hub Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Sukabumi Creative Hub (SCH) sebagai inovasi daerah dalam mendorong ekonomi kreatif di Kota Sukabumi telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Grindle (1980) mengungkapkan temuan-temuan kunci sebagai berikut:

1. Kepentingan Kelompok Sasaran Program SCH dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok sasaran, mulai dari pelaku industri kreatif, komunitas, hingga masyarakat umum. Kegiatan yang dilaksanakan, seperti pelatihan, workshop, pameran, dan forum diskusi, ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari para stakeholder tersebut. Pendekatan ini memungkinkan manfaat program untuk tersebar secara lebih merata dan berkelanjutan.
2. Derajat Perubahan yang Diinginkan SCH memiliki visi perubahan yang jelas, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, program ini berupaya mentransformasi pola kerja dan kapasitas sumber daya manusia di Bappeda dan Disporapar Kota Sukabumi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan inovatif. Sementara secara eksternal, SCH menetapkan target-target terukur dalam indikator kota kreatif yang ditetapkan oleh Bappeda, serta berkontribusi pada peningkatan skor Kota Sukabumi dalam Indeks Kota Kreatif Jawa Barat.
3. Jenis Manfaat yang Dihasilkan Implementasi SCH diharapkan memberikan beragam manfaat bagi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Terbentuknya ekosistem kreatif yang lebih kolaboratif memungkinkan para pelaku di sektor ini untuk saling terhubung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas mereka. Di samping itu, program-program SCH juga berpotensi mendorong munculnya usaha-usaha kreatif baru, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
4. Sumber Daya yang Tersedia Ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi SCH. Meskipun program ini mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kota Sukabumi, jumlahnya masih terbatas dan belum dapat mengakomodasi seluruh rencana kegiatan yang telah disusun. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung juga menjadi tantangan yang harus dikelola secara cermat oleh tim pelaksana SCH.

Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis lebih lanjut terhadap hasil wawancara dan observasi lapangan mengungkap beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program SCH. Faktor-faktor pendukung antara lain:

- a. Komitmen dan dukungan politik dari Wali Kota Sukabumi dan DPRD setempat terhadap pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Terbangunnya jaringan dan kerja sama antara SCH dengan berbagai komunitas kreatif, perguruan tinggi, serta institusi lain di tingkat lokal dan nasional.
- c. Antusiasme dan partisipasi aktif dari para pelaku ekonomi kreatif dalam mengikuti program-program yang ditawarkan oleh SCH.
- d. Keberadaan ruang-ruang kreatif di Kota Sukabumi, seperti Taman Kartini dan Graha Cikondang, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan SCH.

- d. Sementara itu, beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi: a. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk implementasi SCH, sehingga belum dapat mengakomodasi seluruh kegiatan yang direncanakan. b. Masih kurangnya sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang secara khusus menangani implementasi SCH di Bappeda dan Disporapar Kota Sukabumi. c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. d. Masih rendahnya pemahaman dan keterampilan sebagian pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh SCH.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa implementasi SCH sebagai inovasi daerah memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan faktor pendukung sekaligus meminimalkan faktor penghambat yang ada. Perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas sumber daya, dan perluasan kerja sama multipihak menjadi kunci untuk menjaga momentum positif yang telah terbangun.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Sukabumi Creative Hub (SCH) sebagai inovasi daerah dalam mendorong ekonomi kreatif di Kota Sukabumi telah menunjukkan hasil yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dimitigasi. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Grindle memperlihatkan bahwa SCH telah dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok sasaran, memiliki arah perubahan yang jelas, serta menghasilkan beragam manfaat bagi pengembangan ekonomi kreatif setempat. Namun, keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan SDM, masih menjadi kendala utama yang perlu mendapat perhatian serius.

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis dan teoritis. Dari segi praktis, pemerintah Kota Sukabumi perlu terus memperkuat dukungan dan komitmen politik terhadap implementasi SCH, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah juga harus terus didorong agar tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah studi tentang inovasi daerah, khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif. Model implementasi kebijakan Grindle terbukti menjadi kerangka analisis yang bermanfaat untuk memotret kompleksitas dan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Meski demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan pada studi-studi selanjutnya. Pertama, ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada satu daerah membatasi generalisasi temuan. Studi komparatif dengan mengambil beberapa daerah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi inovasi daerah di bidang ekonomi kreatif. Kedua, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif dan pengalaman para penerima manfaat program SCH. Riset lanjutan yang menggunakan pendekatan etnografi atau fenomenologi berpotensi menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang dampak program pada level akar rumput.

Sebagai penutup, pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi daerah seperti Sukabumi Creative Hub merupakan langkah strategis yang perlu terus didorong untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi program semacam ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, niscaya ekonomi kreatif dapat menjadi pilar baru yang menopang kemajuan dan kesejahteraan daerah di masa depan.

## REFERENSI

- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Perdagangan RI. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muluk, M. R. K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Simanungkalit, D. J., Asmaria, A., & Panjaitan, E. (2020). Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dalam Mengimplementasikan Inovasi Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 1-12.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yurisa, D., & Munandar, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Program Sukabumi Creative Hub. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(1), 25-38.